



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR



[bawaslu denpasar](#)



[bawasludenpasar](#)



[denpasar.bawaslu.go.id](#)



LAPORAN

DATA DAN INFORMASI

BAWASLU KOTA DENPASAR

TAHUN 2022

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

1) Pelayanan Informasi

Berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas divisi sebagai berikut:

- a. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan;
- b. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
- d. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi.

Adapun Tugas Data dan Informasi yang tergabung di dalam Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (4) sebagai berikut:

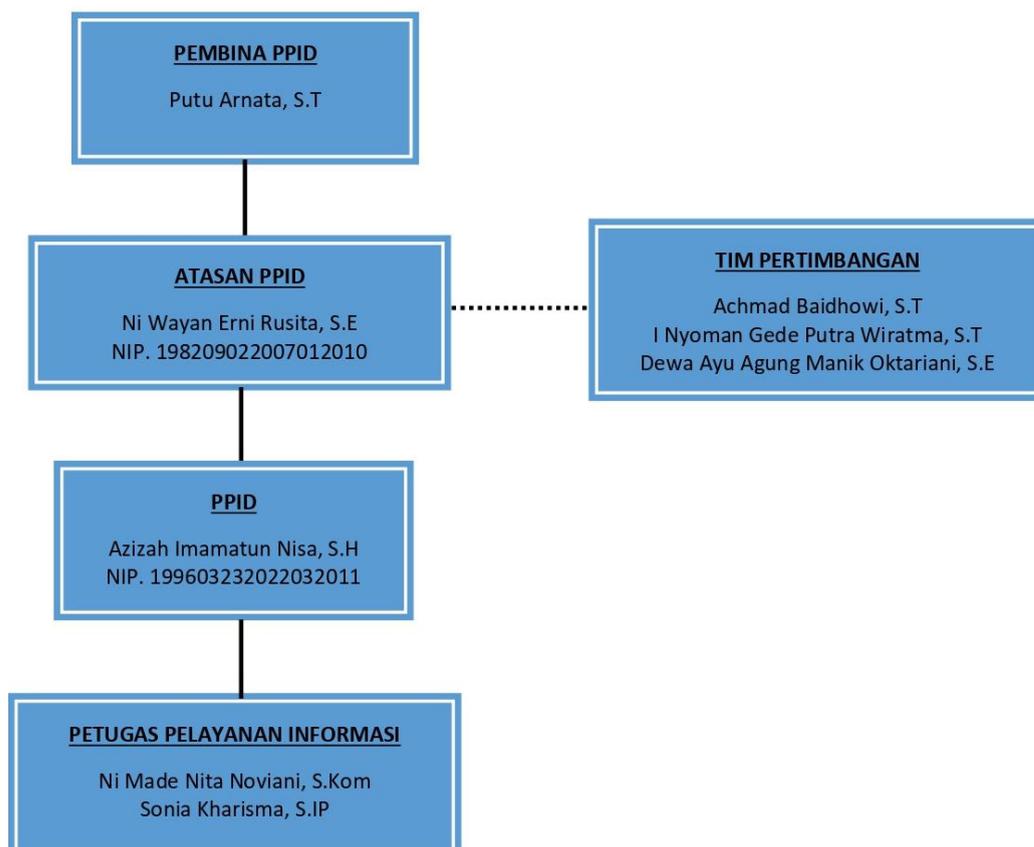
- a. Pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- b. Pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- c. Pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- d. Pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaannya, Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kota Denpasar bertugas dan berwenang dalam pengelolaan data dan informasi yang ada di Bawaslu Kota Denpasar. Pengelolaan data yang dimaksud dimulai dari pengumpulan dan pendokumentasian data dari berbagai divisi yang ada di lingkup Bawaslu Kota

Denpasar, pengelolaan basis data pengawas Pemilu dan Pemilihan, pengoperasian aplikasi publikasi data seperti e-PPID, pelayanan data dan informasi baik internal maupun eksternal yang bekerja sama dengan seluruh bagian yang ada di Bawaslu Kota Denpasar. Selain itu, Divisi Data dan Informasi juga memiliki tugas koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bali terkait perkembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada di Kantor Bawaslu Kota Denpasar.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Denpasar, Divisi Data dan Informasi telah membuat struktur PPID serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan serta kesiapan dalam melaksanakan pelayanan informasi data serta dalam kesiapan menggunakan layanan e-PPID.

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KOTA DENPASAR



PPID Bawaslu Kota Denpasar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) dengan total dokumen yang berjumlah 20 (dua puluh) dokumen yang terdiri dari 10 (sepuluh) dokumen Informasi Berkala, dan 5 (lima) dokumen Informasi Setiap Saat, serta 5 (lima) dokumen Informasi Serta Merta.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BAWASLU KOTA DENPASAR TAHUN 2022

INFORMASI BERKALA

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Hardfile	Softfile	
1	Alamat Lengkap	Bagian Administrasi	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Januari 2021	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
2	Tahapan dan Program Kegiatan Pemilu Tahun 2024	Bagian Administrasi	Bawaslu RI	Jakarta, Juni 2022	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
3	Struktur Organisasi Bawaslu Denpasar 2022	Bagian Administrasi	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Agustus 2022	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
4	DIPA Bawaslu Denpasar 2022	Bagian Keuangan	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Desember 2021	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
5	SK Penetapan DIP 2022	Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Oktober 2022	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
6	SK Perubahan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2021	Bagian Administrasi	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Februari 2021	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
7	SK Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2021	Bagian Administrasi	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Februari 2021	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
8	SK Perubahan Staf Pelaksana Teknis Tahun 2021	Bagian Administrasi	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Mei 2021	√	√	Aktif : Selama

							berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
9	DIP 2022	Bagian Penanganan Pelanggaran, dan Datin	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Oktober 2022	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
10	DIP 2021	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, September 2021	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen

INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Judul Informasi	Pejabat yang menguasai/ menyimpan Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu pembuatan informasi	Format Yang		Keterangan
					Ada		
1	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Bagian Hukum, Humas, dan Datin	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, April 2021	√	√	a Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
2	Jadwal Layanan Informasi Publik Tahun 2022	Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, September 2022	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
3	Renja/RKA Bawaslu Denpasar 2022	Bagian Keuangan	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Desember 2021	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
4	Tata Cara Pendaftaran dan Permohonan Akreditasi Pemantau Pemilu	Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Agustus 2022	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
5	Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat	Bagian Administrasi	Bawaslu Kota Denpasar	Denpasar, Agustus 2022	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen

INFORMASI SERTA MERTA

1	SE Sekjen 0069 tentang Hukuman Disiplin Pegawai yang Mudik di Masa Pandemi Covid-19	Bagian Administrasi	Bawaslu RI	Jakarta, Juli 2020	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
2	SE Sekjen 0068 tentang Pembatasan Cuti di Lingkungan Bawaslu di Masa Pandemi Covid-19	Bagian Administrasi	Bawaslu RI	Jakarta, Juli 2020	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
3	SE Sekjen 0189 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Masa Pandemi Covid-19	Bagian Administrasi	Bawaslu RI	Jakarta, Juli 2020	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun

							Ket : Permanen
4	SE Sekjen 0108 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Tatanan Normal Baru	Bagian Administrasi	Bawaslu RI	Jakarta, Juli 2020	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen
5	Instruksi Pelaporan Hasil Kerja Secara Online di Masa Pannдеми Covid-19	Bagian Administrasi	Bawaslu RI	Jakarta, Juli 2020	√	√	Aktif : Selama berlaku Inaktif : 5 Tahun Ket : Permanen

Pada tahun 2022 Bawaslu Kota Denpasar telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Arah kebijakan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kota Denpasar pada tahun 2022 bukan hanya menguatkan dan mengembangkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di tingkat pusat namun juga penguatan dan pengarusutamaan keterbukaan informasi publik pada level Bawaslu Kabupaten/Kota. Kebutuhan Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik tersebut, sejalan dengan upaya yang tengah dilakukan yakni membangun citra sebagai sebuah Lembaga sekaligus juga rumah bagi masyarakat. Dari Bawaslu, diharapkan masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan informasi terkait demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu.

Selama tahun 2022 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Bawaslu Kota Denpasar di dalam pengelolaan pelayanan informasi data, terdapat 1 (satu) permintaan informasi mengenai seputaran fenomena Golput Pilkada Denpasar Tahun 2020.

2) Penguatan Kapasitas

Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kota Denpasar juga melakukan kegiatan peningkatan kapasitas jajaran di lingkungan Bawaslu Kota Denpasar dengan melaksanakan kegiatan Dalam rangka pengelolaan informasi publik, Bawaslu Kota Denpasar telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik dengan melakukan rapat bersama Komisi Informasi Provinsi Bali dengan agenda Pengelolaan, Pelayanan Data dan Informasi Publik untuk mendapatkan arahan-arahan dari Komisi Informasi Provinsi Bali, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022 dan 21 Desember 2022 yang bertempat di kantor Bawaslu Kota Denpasar.





Rapat Pengelolaan Data dan Informasi Publik dan Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada tanggal 21 Desember 2022. Kegiatan Rapat Pengelolaan Data dan Informasi Publik dan Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Daftar Informasi Yang Dikecualikan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kota Denpasar, Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar, Staff Bawaslu Kota Denpasar, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Denpasar, dan Komisi Informasi Provinsi Bali. Kegiatan rapat dibuka oleh Ketua Bawaslu Kota Denpasar, Putu Arnata dengan pembahasan sebagai berikut:

- a. Cok Kristina, Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - Terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dengan tujuan yang jelas dan masyarakat berhak mencabut data yang telah diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu;

- Tidak menggunakan data pribadi untuk segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang;
- Tidak mengakses Wifi untuk mengakses data pribadi seperti *internet banking* dan *mobile banking*;
- Secara rutin dan berkala untuk mengganti *password* yang sudah ada.

b. Candrawati Sari, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Provinsi Bali, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Diharapkan Lembaga Publik untuk mengelola media sosial yang dimiliki dengan baik untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat;
- Agar selalu memperbaharui data Informasi Publik seperti Informasi Serta Merta, Informasi Yang Tersedia Setiap Saat dan Informasi Berkala;
- Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 data pribadi adalah data yang dikecualikan;
- Jenis kelamin, informasi kesehatan, data anak, nama lengkap merupakan contoh informasi yang dikecualikan;
- Arahkan permohonan informasi ke *e-mail* dan disertai alasan yang jelas peruntukkan informasi tersebut serta tanda tangan elektronik dari pemohon informasi;
- Permohonan informasi dan pengajuan keberatan dalam wewenang PPID dan Atasan PPID, jika ada sengketa informasi merupakan wewenang Ketua;
- Berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2021 sengketa informasi tidak dapat terjadi apabila itu mengenai info Pemilu dan Pemilihan yang masih dalam proses.

c. Anggota Bawaslu Kota Denpasar, I Wayan Sudarsana, menyampaikan bahwa seluruh jajaran Bawaslu Kota Denpasar untuk membaca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

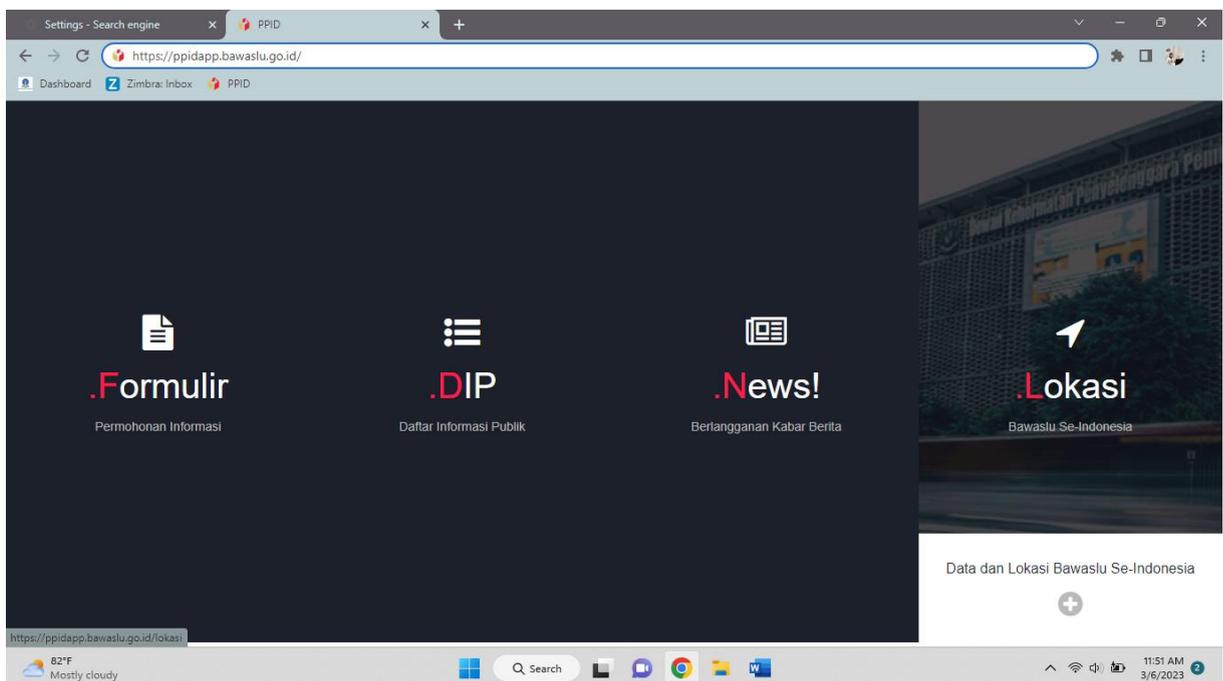
Kegiatan selanjutnya adalah Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2022.

Rangkaian kegiatan PPID Bawaslu Kota Denpasar yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bali dan kegiatan rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bawaslu Kota Denpasar dengan mengundang Komisi Informasi Provinsi Bali sebagai peningkatan kapasitas SDM PPID Bawaslu Kota Denpasar, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja layanan informasi publik Bawaslu Kota Denpasar.

3) E-PPID Terintegrasi

E-PPID terintegrasi dapat diakses melalui

<https://ppidapp.bawaslu.go.id/>



B. TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien serta mudah diakses. Dalam memenuhi kewajiban Undang-Undang tersebut, pada tahun 2022 Bawaslu Kota Denpasar melakukan

pengembangan terhadap salah satu sarana layanan informasi, yakni website Bawaslu Kota Denpasar. Selain memenuhi informasi melalui permohonan dari masyarakat, Bawaslu Kota Denpasar juga berupaya membangun keterbukaan proaktif melalui pengumuman atau publikasi tanpa proses permintaan terlebih dahulu dari masyarakat.

Selama tahun 2022 Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kota Denpasar melakukan pengembangan dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah dengan cara pengembangan yang dilakukan dengan membuat laman formulir online permohonan informasi public melalui scan QR-Code sehingga menjadi lebih memudahkan dalam birokrasi pemrosesan permohonan informasi publik. Dengan adanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi penggunaan pelayanan online ini terkait masyarakat memiliki keleluasaan waktu dalam mengajukan permohonan informasi tanpa terbatas waktu dan wilayah.

1) Aplikasi

Adapun terkait aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di antaranya sebagai berikut:

- JDIH Bawaslu
- Forum Kader SKPP
- Pendaftaran Pemantau Pemilu
- SIPS Bawaslu
- SAKIP Bawaslu
- SIPEKA Bawaslu
- SIPP Bawaslu
- SIMPEG Bawaslu
- SigapLapor

2) Website

Website Bawaslu Kota Denpasar telah berusaha dioptimalkan dengan menambahkan QR-Code Formulir Online Permohonan Informasi Publik ke dalam salah satu sub menu website PPID Bawaslu Kota Denpasar.



C. PEMELIHARAAN JARINGAN DAN INTERNET

Internet Wi-Fi yang digunakan di Bawaslu Kota Denpasar adalah dengan provider Biznet Home dengan Paket Home Combo 2C dengan kecepatan up to 200 Mbps.

D. KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER

Website Bawaslu Kota Denpasar telah mengalami peretasan sebanyak 2 (dua) kali dan selama ini tidak pernah mengganti user dan password.

E. PENGELOLAAN ANGGARAN

Internet	698.000	12 Bulan	8.376.000
Laptop			6.500.000
Rapat Biasa			1.780.000
ATK & Computer Supply	500.000	2 Paket	1.000.000
Konsumsi	39.000	20 OK	780.000

F. TANTANGAN DAN PERMASALAHAN

Adapun tantangan dan permasalahan terkait Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Hambatan:

- Masih minimnya sarana dan prasana penunjang di lingkungan kesekretariatan Bawaslu Kota Denpasar seperti laptop dan printer khusus PPID serta *cloud storage* database dalam website Bawaslu Kota Denpasar yang minim.

Tantangan:

- Dengan anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan Divisi Data dan Informasi terbatas, sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum dapat berjalan maksimal;
- Anggaran merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahapan/non tahapan, sehingga kedepannya Bawaslu Kota Denpasar mengharapkan ketepatan waktu dan efisiensi anggaran sangat diperlukan dalam pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan pada setiap lembaga. Kemampuan anggaran yang diberikan kepada Bawaslu Kota Denpasar mampu diserap secara maksimal dengan terselenggaranya hampir seluruh kegiatan yang sudah direncanakan;
- Kurangnya pelatihan bersama atau bimtek dalam pengelolaan website dan aplikasi yang terintegrasi;

Denpasar, 6 Maret 2023
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran,
Data dan Informasi Bawaslu Kota Denpasar

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below it.

Achmad Baidhowi, S.T., S.H